



RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2023

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, hanya berkat karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 mengacu pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) 2022 – 2026 dan RPJPD Provinsi Jambi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Untuk melanjutkan serta meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat berjalan sesuai rencana, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Kerja (RENJA) ini dalam pengerjaan cukup banyak keterbatasan yang dialami, untuk itu kami mohon berbagai masukan dan saran guna melengkapi dokumen ini untuk dapat mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif.

Jambi, Januari 2022

Kepala Dinas,


TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	19
2.4 Permasalahan Yang dihadapi	22
2.5 Hambatan dan Kendala	23
2.6 Upaya Pemecahan Masalah	23
2.7 Tantangan dan Peluang	23
III. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	26
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	27
V PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selamat setahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi dan arahan menteri Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Jambi, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah.
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

- a. Untuk menjabarkan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan serta Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis Tahun 2023 – 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020. Dengan demikian keterkaitan antara Rencana Anggaran dan Penyusunan Anggaran dapat terjaga sehingga terwujudnya Anggaran berbasis Kinerja dalam suatu OPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1.4.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.4.1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.4.1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4.1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4.1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

1.4.1.5 Analisis Kinerja OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

1.4.1.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja OPD,
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*),
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja OPD,
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.4.2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.4.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

1.4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

1.4.3.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

1.4.3 Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi (%)	4	4	100,0
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	6	4	66,7
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	4	3,1	77,7
Persentase peningkatan Konsumsi Ikan per Kapita (%)	2,6	2,62	100,9
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	83,556	91,8
Nilai SAKIP	BB indeks	BB indeks	100
Opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	WTP Opini		

1). Indikator kinerja persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi

Pada indikator persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian persentase peningkatan

kawasan yang lestari dan terlindungi Tahun 2021 di Provinsi Jambi tercapai meningkat sebanyak 4% yaitu terjadi penambahan 1 lokasi reservat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 25 lokasi, di Tahun 2021 menjadi 26 lokasi jumlah reservat di Provinsi Jambi.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi salah satunya adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa penganggaran untuk pengelolaan konservasi sehingga pengelolaan reservat dapat berjalan maksimal. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menjaga kawasan konservasi juga memegang peranan penting sebagai faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini yaitu meningkatkan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi agar jumlah kawasan yang dikelola bisa bertambah. Dan juga koordinasi dengan stakeholder lainnya untuk mengatasi PETI.

Upaya meningkatkan jumlah reservat yang ada di Provinsi Jambi ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah pesisir melalui beberapa kegiatan terkhusus pada kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2). Indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya sebesar 50.015,5 ton sedangkan pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya sebesar 48.169,1 ton. Dari peningkatan persentase produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 6%, capaian peningkatan persentase produksi perikanan budidaya hanya mampu tercapai sebanyak 4,0%. Belum tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 di tahun 2022 yang menyebabkan banyaknya lahan pembudidaya tidak dapat diusahakan secara optimal, serta harga pakan yang masih cukup tinggi masih menjadi penyebab belum tercapainya target yang diinginkan. Tak hanya itu, adanya alih fungsi lahan pada sebagian unit produksi budidaya pada beberapa Kabupaten/Kota. Adapun alternatif solusi untuk meningkatkan capaian produksi perikanan

budidaya beberapa diantaranya yaitu pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada kelompok pembudidaya ikan, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pembudidaya ikan diantaranya CBIB, gerakan pakan mandiri dan pengendalian hama penyakit ikan.

Produksi perikanan budidaya ini berasal dari perhitungan produksi pembesaran di kolam, pembesaran di keramba/keramba jaring tancap/keramba jaring apung, pembesaran ikan di tambak, dan budidaya di minapadi.

Adapun upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya yang ada di Provinsi Jambi ini dilakukan melalui Program pengembangan perikanan budidaya melalui beberapa kegiatan terkhusus pada kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya serta pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya.

3). Indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Pada indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Tahun 2021 di Provinsi Jambi ditargetkan mengalami peningkatan produksi sebesar 4%. Pada tahun 2021 capaian persentase peningkatan produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 4% atau sebesar 70.000 ton tercapai sebesar 3,1% atau sebesar 54.382,1 ton. Belum maksimalnya capaian peningkatan persentase produksi perikanan tangkap seperti yang ditargetkan diakibatkan terjadinya pandemi covid 19 di Tahun 2021 mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan dan ada beberapa hasil tangkapan yang tidak dapat diekspor dikarenakan larangan saat pandemi covid 19, sehingga para nelayan banyak yang merugi yang mengakibatkan para nelayan menunda atau tidak untuk menangkap ikan dan wilayah penangkapan yang terbatas karna tidak dapat melakukan penangkapan di wilayah perairan tetangga.

Produksi perikanan tangkap ini berasal dari perhitungan produksi tangkapan di wilayah perairan laut dan tangkapan di wilayah perairan umum daratan seperti sungai, danau dan rawa. Upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Provinsi Jambi ini, baik di wilayah tangkapan

perairan laut maupun wilayah tangkapan perairan umum yang telah dilakukan yaitu memberikan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan, memberikan keterampilan nelayan dalam tata cara penangkapan ikan yang baik, memberikan bantuan berupa kapal/pompong

Upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dilakukan melalui Program pengembangan perikanan tangkap melalui beberapa kegiatan pengembangan sarana perikanan tangkap, pengelolaan usaha peangkapan ikan serta pengembangan dan pemberdayaan nelayan.

4). Indikator Persentase peningkatan Konsumsi Ikan per Kapita

Pada indikator persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian persentase konsumsi ikan perkapita Tahun 2021 di Provinsi Jambi dari target peningkatan konsumsi ikan perkapita sebanyak 2,60% atau sebesar 39,00 kg/kapita/tahun, data sementara menunjukkan tercapai sebesar 100,1% yaitu dengan persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita sebesar 2,62% atau sebesar 39,34 kg/kapita/tahun. Upaya meningkatkan konsumsi ikan perkapita yang ada di Provinsi Jambi ini dilakukan melalui Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui beberapa kegiatan Pengembangan pemasaran hasil perikanan, pengembangan unit pengolahan ikan (UPI), promosi dan publikasi kelautan dan perikanan, pembinaan mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan.

5). Indikator indeks kepuasan masyarakat

Pada indikator indeks kepuasan masyarakat, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 di Provinsi Jambi dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan yaitu :

- a) persyaratan pelayanan;
- b) prosedur pelayanan;
- c) waktu pelayanan;
- d) biaya/tarif pelayanan;

- e) produk/hasil pelayanan;
- f) kemampuan petugas pelayanan;
- g) perilaku petugas pelayanan;
- h) kualitas sarana dan prasarana;
- i) penanganan pengaduan pelayanan;

diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada Tahun sebelumnya sebesar 83,556 dan berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,61-88,30.

Upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini dilakukan melalui 5 program sekretariat yaitu:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program peningkatan disiplin aparatur
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6). Indikator Nilai SAKIP

Pada Tahun 2021 dengan target nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi BB indeks tercapai 100% dengan capaian Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebesar 77,5 yang masih di kategori BB indeks.

7). Opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan

Pada tahun 2021 target Opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi belum dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

1). Indikator kinerja persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi

Capaian persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi tahun 2016 - 2021 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Kawasan Yang Lestari dan Terlindungi Tahun 2016 – 2021

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	22	22	23	24	25	25	3,4

Dari tabel 2 terlihat kawasan yang lestari dan terlindungi yang ditandai dengan jumlah suaka perikanan/reservat di Provinsi Jambi pada tahun 2016 sebanyak 22 lokasi dan pada tahun 2021 sebanyak 25 lokasi atau dapat dikatakan selama 5 tahun terakhir telah meningkat sebanyak 3,4% pertahun. Faktor penghambat dalam upaya menjaga keberlangsungan sumberdaya ikan dengan penetapan kawasan lestari dan terlindungi ini adalah karena adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari perairan , sehingga mengganggu keberlangsungan sumberdaya ikan di daerah suaka/reservat perikanan. Penetapan kawasan lestari dan terlindungi merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumberdaya alam di perairan Provinsi Jambi dimana perairannya sudah mendekati kritis. Disamping itu penetapan kawasan ini juga diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan, juga berpengaruh pada peningkatan produksi suatu perairan. Reservat/suaka dapat dibangun pada wilayah pemijahan ikan (zona inti) maupun wilayah anaknya (zona penyangga), untuk dapat melindungi induk ikan yang akan memijah serta anak-anak ikan dari kelangsungan hidupnya

2). Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dapat dilihat berdasarkan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2016 – 2021 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 – 2021*

Indikator	Realisasi						Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.418,5	49.690,5	50.400,1	51.822,9	50.015,5	49.428,9	(0,5)

*Realisasi sementara

Dari tabel tersebut terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 sebesar 49.418,5 ton dan terus mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, hal ini terlihat pada tahun 2017 menjadi 49.690,5 ton, Tahun 2018 produksi perikanan budidaya berada pada angka 50.400,1 ton dan Tahun 2019 menjadi 51.822,9 ton serta pada Tahun 2020 menjadi 50.015,5 Ton akan tetapi berdasarkan estimasi data sementara produksi perikanan budidaya tahun 2021 hanya tercapai sebesar 49.428,9 ton. Produksi di tahun 2016 hingga Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan yang belum signifikan dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya, dan masih mahal nya harga pakan serta untuk Tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda Indonesia termasuk Provinsi Jambi terutama di tahun 2021 banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

3). Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Capaian Produksi perikanan perikanan tangkap tahun 2016 – 2021 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 4. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 – 2021*

Indikator	Realisasi						Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
Produksi Perikanan tangkap (ton)	53.485,6	51.307,7	52.682,4	52.781,3	55.892,3	54.857,3	0,4

*Realisasi sementara

Dari tabel di atas terlihat produksi perikanan tangkap pada Tahun 2016 – 2021 terdapat kenaikan dan penurunan hasil produksi perikanan tangkap, hal

ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, terutama kondisi alam yang tidak stabil seperti kemarau panjang dan bencana kabut asap, gelombang tinggi serta yang terakhir pada tahun 2020 dan 2021 adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Provinsi Jambi yang berdampak besar termasuk nelayan yang ada di Provinsi Jambi, baik nelayan di wilayah perairan laut maupun perairan umum.

4). Indikator persentase peningkatan Konsumsi Ikan perkapita

Persentase peningkatan Konsumsi Ikan perkapita di Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Konsumsi Ikan Perkapita Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*

Indikator	Realisasi						Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
Angka Konsumsi Ikan	35,00	37,00	38,68	39,15	39,40	39,50	0,4

*Realisasi sementara

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2016 menunjukkan angka 35,00 kg/kapita/tahun, hingga Tahun 2021 angka konsumsi ikan perkapita terus mengalami kenaikan. Angka konsumsi ikan sementara tahun 2021 masyarakat Provinsi Jambi mencapai 39,50 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan rata-rata selama kurun waktu 5 tahun sebesar 0,4%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tersebut diatas, tergambar dalam penyerapan APBD (Fisik 95,78% dan keuangan 93,22%). Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Program dalam Bidang Sekretariat:**

Tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dari 5 Program yang dimiliki dalam bidang sekretariat, baik itu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hingga program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .

➤ **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi tangkapan perairan umum solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya bersama dari pihak terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian alam.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan lagi potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) serta edukasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

➤ **Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khususnya kualitas air di sungai yang biasa

digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi.

➤ **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Provinsi Jambi. Solusinya yaitu dengan secara bertahap membina dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 tahun 2015 tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" kepada para nelayan, serta secara berangsur-angsur mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, jikalau nelayan atau pelaku pelanggar penangkapan ikan masih terindikasi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

➤ **Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, mutu, kualitas, dan diversifikasi produk serta sertifikasi bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih belum maksimal sehingga masih belum bisa bersaing dan merebut pasar. Solusi atas kendala tersebut adalah dengan lebih meningkatkan mutu, kualitas,

diversifikasi produk serta meningkatkan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Pengembangan Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Jambi sekitar 114.000 ton/tahun dengan potensi lestari (*maximum sustainable yield-MSY*) sekitar 71.820 ton/thn, yang mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang cukup besar \pm 177 jenis ikan konsumsi dan 38 jenis ikan hias yang sebagian besar merupakan komoditas ekspor dan merupakan potensi plasma nutfah, namun kondisi ini tidak diimbangi ketersediaan SDM nelayan/petani yang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Disamping itu keterbatasan armada penangkapan yang digunakan nelayan penangkap ikan yang umumnya berukuran di bawah 30 GT. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya yang ada, kondisi ini lebih memprihatinkan dengan adanya penangkapan ikan yang kurang bertanggung jawab (*illegal fishing*) dengan menggunakan alat dan bahan terlarang yang digunakan oleh kapal dari Provinsi tetangga maupun kapal asing.

b. Pengembangan Perikanan Budidaya

Luas perairan umum (berupa sungai, danau, rawa) di Provinsi Jambi \pm 115.000 ha dengan potensi sebagai lahan usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 115.000 unit. Wilayah pesisir Pantai Timur Jambi seluas \pm 18.000 Ha merupakan lahan yang potensial bagi pengembangan budidaya air payau. Pada tahun 2021 telah dimanfaatkan seluas 297,3 Ha. Sulitnya memperoleh air dengan salinitas tinggi menyebabkan kurang efisiennya pengembangan komoditas perikanan air payau dan produktifitasnya masih rendah. Lahan potensial bagi pengembangan budidaya kolam kurang lebih seluas 100.700 unit. Jenis kolam yang dikembangkan umumnya disesuaikan dengan kondisi geografis lahan. Di daerah dataran tinggi dikembangkan kolam

air deras (running water), sedangkan di dataran rendah dikembangkan kolam-dalam (deep pond).

Kontribusi perikanan budidaya pada tahun 2021 aberdasarkan perhitungan sementara dalah sebesar 48.169,1 ton dari total produksi 102.551 ton atau sebesar 47,0%. Dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, maka sinergitas di antara berbagai kegiatan perlu ditingkatkan, seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang berkaitan dengan pengolahan/ pemasaran hasil diharapkan dapat meningkat seiring sasaran produksi dan produktifitas yang ditetapkan.

c. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pembangunan sektor perikanan yang diupayakan seoptimal mungkin di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan dengan meningkatnya produksi dan ekspor hasil perikanan dan kemajuan dalam pengolahan produk usaha perikanan. Kecenderungan kebutuhan konsumsi ikan yang semakin meningkat di Provinsi Jambi dan sekitarnya dibarengi oleh kebutuhan penanganan/ pengolahan dan pemasaran yang makin baik. Peningkatan usaha dalam penangkapan dan budidaya ikan perlu dibarengi dengan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Hal ini tampak dari pengembangan sektor perikanan di Provinsi Jambi yang terhambat oleh kondisi timpang dimana nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Jambi umumnya belum memiliki akses langsung terhadap institusi pemasaran, demikian juga terhadap unit pengolahan. Disamping itu masalah kualitas, jaminan mutu dan keamanan produk seperti isu formalin dan pencemaran sungai Batanghari akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dikhawatirkan mencemari hasil perikanan dari sungai Batanghari sedikit banyak mempengaruhi kualitas, jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

Memperhatikan kondisi tersebut maka di Provinsi Jambi perlu ditingkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan dalam aspek kualitas, kuantitas, keragaman produk, serta jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan

dari unit-unit usaha tersebut. Dengan demikian dapat diharapkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat berjalanimbang dengan peningkatan dalam usaha penangkapan dan budidaya ikan.

d. Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jambi memerlukan pengelolaan yang tangguh, karena sejalan dengan perkembangan pembangunan, wilayah pesisir telah mengalami tekanan yang cukup berat, dan secara signifikan telah terjadi eskalasi degradasi yang cukup memprihatinkan. Kecenderungan meningkatnya degradasi lingkungan pesisir dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain ditandai dengan meningkatnya kerusakan mangrove, abrasi pesisir pantai, terumbu karang dan siltasi/delta, serta perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dan erosi dari hulu sungai akibat penggundulan hutan. Belakangan ini kerusakan pesisir dan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga diakibatkan oleh peningkatan aktifitas nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan racun dan listrik.

Untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan pengembangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dimungkinkan diterapkannya strategi yang diintegrasikan dalam pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management (ICZM) yakni pemanfaatan wilayah dalam batas kewajaran yang berkomitmen pada perlindungan dan konservasi wilayah pesisir.

Gugus pulau kecil di Provinsi Jambi antara lain pulau-pulau kecil di muara sungai Berbak Kecamatan Nipah Panjang (Sungai Nipah Panjang; pulau Mudo, pulau Walambi, pulau Parang Kudo, pulau Telor dan Pulau Nyiri) yang merupakan pulau delta yang pembentukannya dari endapan sedimen.

Kawasan hutan mangrove di Provinsi Jambi, misalnya di kawasan Tungkal Ilir lebih kurang 21,5 km merupakan bagian dari 86 km panjang pantai pesisir timur Propinsi Jambi yang diprioritaskan sebagai kawasan cagar alam. Kawasan ini

merupakan kawasan dibatasi oleh dataran lumpur yang mengarah ke tepi laut. Seluruh mangrove di pesisir timur ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan SK Menteri Pertanian No 507/KPTs/Um/6/1981.

2.4 Permasalahan Yang dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah, karena terbatasnya kemampuan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca.
3. Masih kurangnya sarana penangkapan ikan bagi nelayan.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan masih banyak yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
6. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan komersil yang tidak diikuti dengan naiknya nilai harga ikan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

2.5 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam Tahun 2021 antara lain masih terbatasnya sumberdaya manusia yang menangani bidang perikanan sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan belum maksimal serta adanya pandemi covid 19 yang masih melanda Indonesia terutama Provinsi Jambi.

2.6 Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Penambahan pemberian bantuan sarana dan prasarana meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan DAK.
4. Pelatihan dan sosialisasi/edukasi bagi pelaku usaha perikanan.
5. Meningkatkan pelatihan keterampilan nelayan, pelatihan penggunaan alat tangkap, melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar, Cara Pembenihan Ikan Yang Benar (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).
6. Mensosialisasikan pembudidaya agar mengikuti GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri).
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/ pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

2.7 Tantangan dan Peluang

1. Tantangan Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Jambi masih terbatas di perairan pantai mengingat kemampuan armada penangkapan yang didominasi oleh kapal berkekuatan kecil dan sedang, yakni kapal/perahu bertonase di bawah 10 GT. Di samping itu pengelolaan sumberdaya kelautan masih menghadapi tantangan adanya pencurian ikan (*illegal fishing*) dan pelanggaran lain dalam penangkapan ikan (*unregulated and unreported fishing*). Kurangnya sarana dan alat penegakan hukum, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, serta rendahnya koordinasi antar instansi mengakibatkan tingkat pencurian ikan belum teratasi.

Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah. Dalam perairan umum Provinsi Jambi terdapat 235 jenis ikan, yang beberapa diantaranya sudah mulai tidak ditemui seperti ikan Ridik Angus dan Kurau Jenggot serta beberapa spesies ikan yang terancam punah seperti Ringo, Belido, Arwana, Udang Galah, Belida, Patin, dalung, dll.

2. Tantangan Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya ditargetkan mencapai peningkatan sekitar 6,0 % per tahun. Hal ini merupakan tantangan yang besar untuk menyelesaikan permasalahan di sektor hulu, in-proses dan hilir.

Di sektor hulu, dalam hal penyediaan pakan dan benih masih terdapatnya benih yang bermutu rendah dan mahalnya harga pakan pabrikan. Di dalam proses budidaya tantangan berupa masih lemahnya kemampuan teknis sebagian pembudidaya pemula, sehingga efisiensi usaha untuk meningkatkan keuntungan belum tercapai. Di sektor hilir terutama belum terbukanya pasar ekspor dan terbatasnya pasar regional, sehingga produk budidaya umumnya masih bertumpuk di pasar lokal yang menyebabkan rendahnya produktifitas pembudidaya.

3. Tantangan Pemasaran dan Pengolahan Ikan

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Provinsi Jambi menghadapi tantangan belum terkuasainya teknologi pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya, terutama pemasaran ke luar daerah/Provinsi..

4. Tantangan Pelestarian Sumberdaya Ikan

Provinsi Jambi memiliki 235 jenis ikan lokal yang sebagian kecil diantaranya sudah sulit ditemukan seperti ikan Ridik Angus dan Kurau Jenggot serta beberapa spesies ikan yang terancam punah seperti Ringo, Belido, Arwana dan Belida. Untuk mempertahankan populasi dan jenis-jenis ikan spesifik lokal di perairan umum tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan beserta dinas yang menangani perikanan di kabupaten/kota. Upaya penyadaran hukum dan pelestarian bersama dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 yang disusun untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, dimana untuk Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun mengacu pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2022-2026.

Tabel 6 Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai Perda RZWP3K	Pengelolaan Ruang Laut oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
2	Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54.480,9 Ton	54.807,8 Ton	55.136,7 Ton	55.467,5 Ton	55.800,3 Ton
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	57.168,0 Ton	58.997,0 Ton	60.885,0 Ton	62.833,0 Ton	64.843,6 Ton
3	Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Keautan dan Perikanan	Meningkatnya Ketaatan Unit Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	62%	64%	66%	68%	70%
4	Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40,60 Kg/ Kapita/ Tahun	41,00 Kg/ Kapita/ Tahun	41,50 Kg/ Kapita/ Tahun	42,00 Kg/ Kapita/ Tahun	42,50 Kg/ Kapita/ Tahun
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB Indeks	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mengalami perubahan yang cukup besar karena Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditentukan pada Permendagri Tahun 2019 serta telah diimplementasikan pada aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terkecuali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :***
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD sebanyak 10 laporan.

- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 laporan.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :***

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 154 orang/bulan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan administrasi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 dokumen.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :***

- a. Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan

- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :***

- a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 325 paket.

- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 20 orang.

- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 200 orang.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja subkegiatan ini Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 3 paket.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 5 paket.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 2 paket.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen.
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan sebanyak 11 unit.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 1 unit.
- c. Sub Kegiatan pengadaan Mebel
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 5 paket.
- d. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 10 unit.
- e. Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 unit.
- f. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 10 unit.

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 4 laporan.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 59 unit.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 3 unit.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 20 unit.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- *Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi :*

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola seluas 3.560,45 Ha.

- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi seluas 352,4 Ha.

- d. Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 60 orang.

- *Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :*

- a. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin-izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.

c. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam system kadaster laut
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut sebanyak 2 dokumen.

- **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :**

a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya sebanyak 60 orang.

b. Sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 2 kelompok.

c. Sub Kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 20 orang

d. Sub kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak sebanyak 3 kelompok.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil sebanyak 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 2000 unit.
- c. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 15 unit.

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 1 Dokumen
- b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 300 unit.

- c. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 5 unit.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tagkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 Dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan sebanyak 32 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia sebanyak 1 dokumen.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan sebanyak 17 rekomendasi.

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Dlusahkan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 Dokumen

- b. Sub Kegiatan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan sebanyak 15 dokumen.

- Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :

- a. Sub kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebanyak 1 pelabuhan perikanan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia sebanyak 2 unit.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 2 layanan.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 5 rekomendasi.

- Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan sebanyak 15 rekomendasi.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko sebanyak 1 dokumen

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersusunnya SOP dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi

- ***Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 rekomendasi.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 rekomendasi

- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen

- b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut sebanyak 4 unit

- c. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota sebanyak 100 unit.

- d. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut sebanyak 4 unit.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

dan/atau manfaat atau dampak negatifya lintas daerah kabupaten/kota sebanyak 6 unit

- f. Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat sebanyak 2 dokumen

- g. Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pembudidaya sebanyak 60 orang

- h. Sub Kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi seluas 4 Ha.

- i. Sub Kegiatan Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 20 orang.

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- *Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil :*

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil

Indikator kinerja subkegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil sebanyak 3 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil sebanyak 2 dokumen.

- c. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 2 dokumen.

- ***Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 3 dokumen

- b. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 3 dokumen.

- c. Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 dokumen.

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi sebanyak 3 rekomendasi.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 3 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko sebanyak 3 Dokumen

- ***Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :***

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko sebanyak 13 unit usaha

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing sebanyak 13 unit usaha

- *Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :*

- a. Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan kebutuhan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 Dokumen

- b. Sub Kegiatan Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi sebanyak 10 unit usaha.

- c. Sub Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir sebanyak 1 Dokumen

BAB 5

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama satu tahun mendatang.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif tahun 2022.

LAMPIRAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI	Nilai SAKIP	Provinsi Jambi	BB Indeks	30.072.138.078	APBD		A Indeks	32.415.101.886
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Laporan	905.000.000	APBD		2 Laporan	995.000.000
3.25.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	2 Dokumen	240.000.000	APBD		2 Dokumen	260.000.000
3.25.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	2 Dokumen	55.000.000	APBD		2 Dokumen	65.000.000
3.25.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	170.000.000	APBD		10 Laporan	190.000.000
3.25.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	440.000.000	APBD		1 Laporan	480.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	22.604.638.078	APBD		12 Bulan	24.862.601.886
3.25.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	154 Orang/Bulan	22.079.638.078	APBD		156 Orang/Bulan	24.287.601.886
3.25.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	525.000.000	APBD		1 Dokumen	575.000.000

3.25.01.1.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	Provinsi Jambi	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
3.25.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3.25.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	150.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	1 Tahun	520.000.000	APBD		1 Tahun	540.000.000
3.25.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Jambi	325 Paket	250.000.000	APBD		325 Paket	250.000.000
3.25.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	100.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000
3.25.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	170.000.000	APBD		200 Orang	190.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	1.047.500.000	APBD		12 Bulan	1.047.500.000
3.25.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	3 Paket	15.000.000	APBD		3 Paket	15.000.000
3.25.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	300.000.000	APBD		5 Paket	300.000.000
3.25.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
3.25.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	50.000.000	APBD		2 Paket	50.000.000
3.25.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	75.000.000	APBD		2 Paket	75.000.000
3.25.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	7.500.000	APBD		1 Dokumen	7.500.000
3.25.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	400.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000

3.25.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	2.940.000.000	APBD		12 Bulan	2.915.000.000
3.25.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Jambi	11 Unit	865.000.000	APBD		11 Unit	865.000.000
3.25.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	700.000.000	APBD		1 Unit	700.000.000
3.25.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	175.000.000	APBD		5 Paket	150.000.000
3.25.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	200.000.000	APBD		10 Unit	200.000.000
3.25.01.1.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	700.000.000	APBD		1 Unit	700.000.000
3.25.01.1.07.10	- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	300.000.000	APBD		10 Unit	300.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	655.000.000	APBD		12 Bulan	655.000.000
3.25.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
3.25.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	4 Laporan	650.000.000	APBD		4 Laporan	650.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 bulan	1.200.000.000	APBD		12 Bulan	1.200.000.000
3.25.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	500.000.000	APBD		59 Unit	500.000.000
3.25.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	100.000.000	APBD		4 Unit	100.000.000

3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	3 Unit	500.000.000	APBD		3 Unit	500.000.000
3.25.01.1.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	100.000.000	APBD		20 Unit	100.000.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	3.120.000.000	APBD		2 Izin	3.590.000.000
		KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (kumulatif)		16.400,53 Ha				27.613,89 Ha	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	60%	2.625.000.000	APBD		75%	3.040.000.000
3.25.02.1.01.01	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K	Provinsi Jambi	1 Dokumen	405.000.000	APBD		1 Dokumen	405.000.000
3.25.02.1.01.02	- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	3.560,45 Ha	920.000.000	APBD		5.713,04 Ha	1.050.000.000
3.25.02.1.01.03	- Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Jambi	352,4 Ha	1.090.000.000	APBD		554,5 Ha	1.225.000.000
3.25.02.1.01.04	- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	210.000.000			60 Orang	360.000.000
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terbitnya perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Dokumen	245.000.000	APBD		2 Dokumen	120.000.000

3.25.02.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi			APBD			
3.25.02.1.02.02	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	50.000.000	APBD		2 Rekomendasi	50.000.000
3.25.02.1.02.03	- Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	115.000.000	APBD		2 Rekomendasi	40.000.000
3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Provinsi Jambi						
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Provinsi Jambi	2 Dokumen	80.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Provinsi Jambi	4 Kelompok	250.000.000	APBD		4 Kelompok	430.000.000
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Jambi	60 Orang	70.000.000	APBD		60 Orang	70.000.000
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	2 Kelompok	50.000.000	APBD		8 Kelompok	250.000.000
3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	20 Orang	30.000.000	APBD		20 Orang	30.000.000

3.25.02.1.03.04	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	3 Kelompok	100.000.000	APBD		3 Kelompok	80.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Provinsi Jambi	54.807,8 Ton	9.321.740.000	APBD		55.136,7 Ton	7.836.810.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampal Dengan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	48.905,1 Ton	3.370.000.000	APBD		50.320,0 Ton	3.625.000.000
3.25.03.1.01.01	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampal Dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	1 Dokumen	180.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
3.25.03.1.01.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2000 Unit	3.060.000.000	APBD		2500 Unit	3.285.000.000
3.25.03.1.01.03	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	15 Unit	130.000.000	APBD		15 Unit	140.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD	Provinsi Jambi	5.902,7 Ton	1.476.740.000	APBD		4.816,7	1.616.810.000
3.25.03.1.02.01	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	1 Dokumen	451.740.000	APBD		1 Dokumen	466.810.000
3.25.03.1.02.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	300 Unit	895.000.000	APBD		350 Unit	1.010.000.000
3.25.03.1.02.03	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	5 Unit	130.000.000	APBD		5 Unit	140.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	Provinsi Jambi	32 Izin	510.000.000	APBD		34 Izin	520.000.000

3.25.03.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tagkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	345.000.000	APBD		1 Dokumen	345.000.000
3.25.03.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	32 Rekomendasi	145.000.000	APBD		34 Rekomendasi	150.000.000
3.25.03.1.03.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 Gt sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Provinsi Jambi	17 Izin	320.000.000	APBD		19 Izin	325.000.000
3.25.03.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	175.000.000	APBD		1 Dokumen	175.000.000
3.25.03.1.04.02	- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	17 Rekomendasi	145.000.000	APBD		19 Rekomendasi	150.000.000

3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Kewenangan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Jambi	1/S Kapal	1000.000.000	APSD		1000.000.000	1000.000.000
3.25.03.1.05.01	- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	110.000.000	APSD		1 Dokumen	110.000.000
3.25.03.1.05.02	- Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	15 Dokumen	70.000.000	APSD		15 Dokumen	75.000.000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.020 Kapal	3.010.000.000	APSD		4.180 Kapal	2.100.000.000
3.25.03.1.06.01	- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Provinsi Jambi	1 Pelabuhan Perikanan	150.000.000				
3.25.03.1.06.02	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	2 Unit	1.970.000.000	APSD		1 Unit	175.000.000
3.25.03.1.06.03	- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	890.000.000	APSD		2 Layanan	925.000.000
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Provinsi Jambi	2 Kapal	195.000.000	APSD		2 Kapal	195.000.000

3.25.03.1.07.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	1.350.000.000
3.25.03.1.07.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	60.000.000	APBD		2 Rekomendasi	60.000.000
3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya izin kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Jambi	5 Kapal	185.000.000	APBD		5 Kapal	185.000.000
3.25.03.1.08.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	125.000.000	APBD		1 Dokumen	125.000.000
3.25.03.1.08.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	5 Rekomendasi	60.000.000	APBD		5 Rekomendasi	60.000.000
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Provinsi Jambi	15 Kapal	75.000.000	APBD		20 Kapal	85.000.000

3.25.03.1.09.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
3.25.03.1.09.02	- Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	15 Rekomendasi	40.000.000	APBD		20 Rekomendasi	50.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Jambi	58.997,0 Ton	7.808.500.000	APBD		60.885,0 Ton	8.535.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan	Provinsi Jambi	25 Izin	77.000.000	APBD		30 Izin	94.000.000
3.25.04.1.01.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	30.000.000	APBD		1 Rekomendasi	35.000.000
3.25.04.1.01.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	20.000.000	APBD		1 Rekomendasi	25.000.000
3.25.04.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Jambi	1 Dokumen	27.000.000	APBD		1 Dokumen	34.000.000
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan di laut	Provinsi Jambi	2 Izin	50.000.000	APBD		3 Izin	60.000.000
3.25.04.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	30.000.000	APBD		1 Rekomendasi	35.000.000
3.25.04.1.02.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	20.000.000	APBD		1 Rekomendasi	25.000.000

3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tersedianya Izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Provinsi Jambi	2 Izin	395.000.000	APBD		2 Izin	480.000.000
3.25.04.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	145.000.000	APBD		1 Rekomendasi	180.000.000
3.25.04.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	250.000.000	APBD		1 Rekomendasi	300.000.000
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut dan lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	6 Kelompok	320.000.000	APBD		7 Kelompok	390.000.000
3.25.04.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	120.000.000	APBD		1 Rekomendasi	140.000.000
3.25.04.1.04.02	- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	200.000.000	APBD		1 Rekomendasi	250.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	9 Jenis	6.966.500.000	APBD		9 Jenis	7.511.000.000

3.25.04.1.05.01	- Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
3.25.04.1.05.02	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	4 Unit	160.000.000	APBD		4 Unit	160.000.000
3.25.04.1.05.03	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	5.320.000.000	APBD		100 Unit	5.320.000.000
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	4 Unit	100.000.000	APBD		4 Unit	100.000.000
3.25.04.1.05.05	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	6 Unit	551.500.000	APBD		6 Unit	551.500.000
3.25.04.1.05.06	- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Provinsi Jambi	2 Dokumen	500.000.000	APBD		2 Dokumen	615.000.000
3.25.04.1.05.07	- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Jambi	60 Orang	75.000.000	APBD		60 Orang	80.000.000

3.25.04.1.05.08	- Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Provinsi Jambi	4 Ha	110.000.000	APBD		4 Ha	110.000.000
3.25.04.1.05.09	- Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	20 Orang	100.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE UNIT USAHA PERIKANAN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Provinsi Jambi	65%	1.263.000.000	APBD		70%	1.327.000.000
		PENANGANAN KASUS PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		50%				5%	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	64%	756.000.000	APBD		66%	776.000.000
3.25.05.1.01.01	- Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	3 Dokumen	130.000.000	APBD		3 Dokumen	130.000.000
3.25.05.1.01.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2 Dokumen	590.000.000	APBD		2 Dokumen	610.000.000
3.25.05.1.01.03	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2 Dokumen	36.000.000	APBD		2 Dokumen	36.000.000

3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	74%	507.000.000	APBD		80%	551.000.000
3.25.05.1.02.01	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Jambi	3 Dokumen	310.000.000	APBD		3 Dokumen	331.000.000
3.25.05.1.02.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Jambi	3 Dokumen	112.000.000	APBD		3 Dokumen	125.000.000
3.25.05.1.02.03	- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	85.000.000	APBD		1 Dokumen	95.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	Provinsi Jambi	41,00 Kg/Kapita/ Tahun	4.649.800.000	APBD		41,50 Kg/Kapita/ Tahun	5.061.500.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Terbitnya Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	4 Izin	2.609.000.000	APBD		4 Izin	2.848.000.000

3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	225.000.000	APBD		1 Dokumen	125.000.000
3.25.06.1.03.01	- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
3.25.06.1.03.02	- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	485.000.000	APBD		10 Unit Usaha	500.000.000
3.25.06.1.03.3	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Provinsi Jambi	1 Dokumen	335.000.000	APBD		1 Dokumen	370.000.000
JUMLAH						56.235.178.078			58.765.411.886

Jambi, Januari 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI


TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002